

Daftar Pustaka

- Adhayanto, Oksep & Satyagraha Adiputra, Yudhayanto. 2015. Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan Kelautan dan Pertambangan). *Jurnal Selat*, Mei, Vol. 2, No. 2, Ed. 4, hal. 296.
- Adhelia, Baby. 2018. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Tanjungpinang (Studi tentang Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 Lantai). *Artikel, Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Agung Djijosoekarto. 2004. *Dinamika dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*. Jakarta : Konrad Adeneur Sitiftung, hlm. 235.
- Constantinides, Panos. 2012. *Chapter 1. Introduction: Historical Review of Infrastructure Development*. Perspectives and Implications for the Development of Information Infrastructures. Universty of Manchester. Hal. 4.
- Dahlan Thalib. 2004. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, hlm 2.
- Fatmawati. 2014. *Hukum Tata Negara*. Tengerang Selatan : Universitas Terbuka, hlm 7.
- Inosentius Syamsul. 2004. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. (Jakarta: Adeksi, 2004), hlm.74.

- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: 14 Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok : FISIP UI Press.
- Jimly Asshidiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Press, hlm. 299.
- Juharni & Umar. 2016. Model Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrare*, Vol. 3, No.1, hal. 61.
- Kawulur, Ingrid, dkk. 2017. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa talikuran kecamatan tompaso kabupaten minahasa. *Jurnal eksekutif*. Vol.1, No.1.
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Loewenberg, Gehard *et al*. 1985. *Handbook of Legislative Research*. Cambridge : Havard University Press, hlm 98.
- M. Saiegh, Sebastian. 2005. *The Role of Legislatures in the Poliy-making Process*. *Inter-Amrican Development Bank, Washingt DC*. (Departement of Political Science, University of Pittsburgh), hal. 8.
- M. Situmorang, Victor & Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum E-Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cetakan 11)*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 18.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Oyan, James. (2017). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado. *Jurnal Politico*, Vol. 6, No.1, hal.10.
- Pramana, Gilang. 2013. Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara. *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, Nomor 1. Hal 587.
- Ransun, Yohanes F.C, Dkk. 2017. Kinerja Dinas PUPR Kota Manado Dalam pemeliharaan infrastruktur Jalan Daerah. *Jurnal Eksekutif*, Vol.1, No.1, Hal. 5-6.
- Rembu, Yoakim. 2012. Pola Pengawasan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Bidang Pendidikan di Kota Malang. *JISIP*, Vol. 1, No.1.
- Rianto Adi. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. hlm 72.
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wisoyo. 2008. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, hal. 156.
- Salim & Syahrums. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media, hlm. 114.
- Sarkawi. 2017. Pedoman, Bentuk, dan Teknik Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD. *Jatiswara*, Vol. 30., No.01, Hal. 26.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrums, dan Salim. 2012. *Metodelogi Peneltian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.

Syamsudin Haris. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. (Jakarta : LIPI Press, 2005), hlm 147.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwarna. 2007. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Torrisi, Gianpiero. 2009. Infrastructure and Economic Performance: a Critical Comparison Across Four Approach. *MPRA (Munich Personal RePRc Archive)* : Newcastle University, CURDS. Hal. 12.

Usaid. 2007. *Membina Hubungan dengan Konstituen*. Jakarta : LGSP, hlm. 36.

Wibowo, Anton Styo, dkk. 2013. Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Kabupaten Jepara. *Unnes Civic Educational Journal*, Vol. 2, No. 2, hal. 44.

Regulasi :

Peraturan Bupati Kebumen No. 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Internet :

<https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/29/93/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-1996-2019.html>), diakses 1 September 2020

<https://kebumenkab.bps.go.id/publication/>, diakses pada 26 April 2021

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27310/t/Pembangunan+Infrastruktur+Solusi+Pengentasan+Kemiskinan>, diakses pada 1 September 2020

<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/19>, diakses pada 1 Februari 2021

<https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang>, diakses pada 28 Mei 2021

<http://cetak.bangkapos.com/opini/read/187/Fungsi+Pengawasan+DPRD.html>., diakses pada 1 Februari 2021